

Aksi Damai Diam Hitam Kamisan di Depan Istana Presiden- Kamisan ke-93
JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan)
Jl. Bonang NO 1A, Menteng Jakarta 12870 Telp (021) 3191181

Nomor : 64/Surat Terbuka_JSKK/XII/2008 Jakarta, 18 Desember 2008
Hal : **Tahun 2008 Adalah Kesempatan Terakhir Pemerintah**
SBY – JK Membuktikan Komitmen Pengakuan HAM

Kepada Yth,
Presiden Republik Indonesia
Bapak Susilo Bambang Yudhoyono
di Jakarta

Bapak Presiden yang kami hormati,
Hari ini kami keluarga korban pelanggaran HAM kembali datang ke Istana dalam aksi yang dikenal dengan sebutan *aksi damai hitam diam kamisan* korban melawan impunitas. Perlu kami beritahukan kepada bapak presiden, bahwa aksi kamisan hari ini adalah yang ke 93 kali sekaligus sebagai aksi tutup tahun di penghujung tahun 2008. Namun demikian aksi ini akan terus kami selenggarakan untuk terus mengingatkan kepada pemerintah dan masyarakat bahwa kasus kasus pelanggaran HAM besar belum terselesaikan dan masih terus terjadi.

Sampai hari ini pemerintah belum maksimal dan konsekwen dalam melaksanakan UUD 1945 dan produk perundang lainnya termasuk hasil ratifikasi terhadap (adopsi) sejumlah instrumen hukum HAM internasional yang sudah menjadi hukum nasional. Sudah semestinya produk-produk hukum tersebut untk melindungi segenap masyarakat dari tindakan melwan hukum, kami para korban mendapat perlakuan tidak adil. Kami telah kehilangan putra-putri terbaik yang menjadi korban penghilangan secara paksa, pembunuhan dan penahanan secara sewenang-wenang tanpa proses hukum pada 1965/1966.

Kami telah kehilangan anak, suami, istri, kekasih dalam tragedi Mei 1998, kami telah kehilangan sanak saudara dalam penembakan di kampus Atmajaya, Kampus Trisakti dalam peristiwa Tanjung Priok 1984, Talangsari Lampung 1989, DOM dan Darurat Militer di Aceh, Darurat Militer di Papua, Timor Timur pembunuhan aktivis HAM Munir dan masaih banyak lagi sedertaan aski pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan penguasa negeri ini yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu.

Sementara itu, pelaku kejahatan kemanusiaan masih belum tersentuh oleh jerat hukum bahkan dengan leluasa ingin maju sebaga calon legislatif atau pun calon presiden dalam pemilu 2009. hal ini sungguh melukai hati para korban. Kerja tim Penyelidik Komnas HAM dalam upaya untuk menuntaskan kasus kejahatan pelanggaran HAM terganjal oleh Kejaksaan Agung dengan dalih pengadilan HAM ad hoc belum terbentuk. DPR yang berwenang merekomendasikan terbentuknya pengadilan HAM ad hoc tentu saja akan

membela kepentingan politiknya, sebagai besar anggota DPR mewakili orde baru yang sarat dalam pelanggaran HAM.

Bapak Presiden yang kami hormati,

Masa bakti bapak presiden tinggal menghiung hari. Terkait dengan komitmen penegakan HAM yang bapak janjikan, kami harapkan bukan sekedar janji kosong. Tahun ini adalah tahun terakhir pembuktian penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, karena pada tahun 2009, bapak presiden dan segenap penyelenggara negara akan fokus pada upaya mempertahankan kekuasaan pada pemilu 2009. Untuk itu kami hendak menegaskan wujud komitmen penegakan HAM hanya ada satu kata, tahun ini atau sejarah akan mencatat kegagalan.

Jakarta, 18 Desember 2008

JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan)

Sumarsih

Suciwati

Bedjo Untung

Tembusan kepada:

Menteri Sekretaris Negara RI

Komnas HAM RI